

Sikap Dunia Pendidikan Dalam Era Globalisasi

✓✓
Widigdo Sukarman

In globalization threr are the development of education that is in line with economic development. The influence of economic capitalism created the idea that competition is geared towards destroying each other. The motivation to collect wealth, individualism and unhealthy competition are converted into greed. The gaps between winners and the losers are widened.

It is the role of universities to cope with the challenging issue of social ethics as there impacts of globalization. University has been oriented towards economic means without meeting the needs of the society. The universities are further away from moral education. Universities have their own problem. Competitions now are both local and global level. Therefore universities have to educate not only experts and skilled laborers, but also thinkers who are concerned with the whole problem of the society.

Pengantar

Limabelas tahun yang lalu, dalam rangka ulang tahunnya yang ke-25 harian Kompas melakukan sarasehan tentang mengantisipasi perkembangan abad mendatang dan persiapan SDM untuk kebutuhan tersebut. Kesimpulan sarasehan tersebut adalah, bahwa untuk membangun manusia baru Indonesia ada tiga sifat utama yang harus dipenuhi; *pertama*, serba tahu atau sadar akan ilmu pengetahuan dan teknologi, *kedua*, harus kreatif, dan *ketiga*, memiliki solidaritas dengan sesamanya dan memiliki kesadaran etis.

Setelah 15 tahun kemudian, apakah keinginan-keinginan tersebut telah terjawab? Apakah tiga pilar tujuan diatas telah atau akan dapat dicapai? Dan apakah universitas sebagai lembaga yang secara formal membentuk nalar berpikir seseorang, telah berhasil mewujudkan maksud-maksud di atas? Apakah pendidikan primer dan sekunder telah berhasil mempersiapkan kemampuan bagi mereka yang akan menjalani pendidikan tersier? Pertanyaan-pertanyaan timbul karena dalam berbagai kesempatan telah terjadi perdebatan-perdebatan mengenai pendidikan yang menghasilkan sarjana yang "siap pakai" atau yang "siap latih", mengenai kepandaian dan kemampuan versus etika moral.

Pasar tenaga kerja dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan universitas akhirnya hanya berfungsi mencetak manusia-manusia yang "siap pakai" dan bukan "siap latih".¹ Pasar-kerja yang semakin kompetitif hanya memerlukan tenaga yang berpengalaman, menyebabkan orientasi mahasiswa masuk universitas

lebih didorong untuk menjadi "tukang" daripada sebagai cendekiawan atau pemikir. Karena harapan mereka yang lebih pragmatis untuk mudah memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang baik untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan masa depan yang lebih menjanjikan. Itulah mengapa masyarakat memaknai posisi universitas dengan pemahaman sepragmatis itu.

Perkembangan Ekonomi Dan Pendidikan

Pendirian universitas di Old World pada mulanya dimaksudkan untuk mencetak para pendeta (*clergymen*), dengan cara pendidikan yang lebih mirip pesantren kita, dimana agama dan pembentukan moral menjadi dasar pelajarannya. Suatu hal yang wajar karena saat itu peran dan posisi gereja begitu kuat mendominasi kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dalam perkembangannya, evolusi penemuan dalam bidang ilmu alam, yang membuktikan bahwa kenyataan alam berbeda dengan kaidah-kaidah hukum Kanonik, telah mendorong pemikiran manusia kearah rasionalitas yang kemudian menyebabkan timbulnya era Pencerahan. Dibidang ekonomi, Revolusi Industri yang terjadi di Inggris juga mempercepat kebebasan pemikiran (*enlightenment*) yang telah berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang tadinya tersendat karena hambatan keagamaan, menjadi lebih maju setelah muncul pembiayaan dari bank. Larangan pembiayaan bank karena dianggap riba (*usury*), di"terobos" oleh kaum Yahudi yang boleh memberikan kredit kepada kaum non-Jahudi yang bukan "kaumnya".

Universitas juga mengalami perubahan yang dahsyat. Dasar pendidikan Kanonik berubah menjadi berdasarkan rasionalitas, karena diyakini bahwa perubahan-perubahan ekonomi dan sosial semuanya berbasis pada kemampuan kreatif manusia yang ditopang oleh rasionalitas. Maka pada abad ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tidak terbendung. Penelitian-penelitian, konsep-konsep dan teori-teori menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Semua temuan tersebut diadopsi oleh sektor industri untuk mendorong penciptaan komoditas industri guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan ekonomi berjalan pesat karena dukungan sektor industri yang telah menggunakan mesin-mesin industri, pengelolaan industri secara modern, dan penerapan prinsip-prinsip spesialisasi kerja untuk efisiensi.

Akibatnya, akselerasi industri yang demikian tinggi berdampak pada penciptaan efisiensi industri. Filsafat lalu berubah menjadi ilmu. Pada masa peralihannya, penjelajahan filsafat menjadi menyempit, tidak lagi bersifat komprehensif tapi sektoral. Dengan demikian, persoalan etika moral akhirnya tidak dilihat secara menyeluruh, tetapi bersifat sektoral yang dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, yang selanjutnya berkembang menjadi ilmu ekonomi. Dengan demikian ilmu ekonomi berkembang sebagai etika terapan. (*applied ethics*).²

Dalam suasana perubahan-perubahan ekonomi dan sosial masyarakat itu, masih ada orang-orang yang mengingatkan mengenai dasar moral. Situasi perekonomian yang merkantilis, menyebabkan timbulnya pandangan yang ingin

¹ Penjelasan lebih lengkap lihat kata pengantar Arief Budiman dalam buku yang ditulis Derek Bok, *Universitas dan Masa Depan Amerika*, (Yayasan Sumber Agung, Jakarta, 1997), hal. viii.

² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hal. 24

merubahnya dengan mengembalikan kepada hak-hak individu sebagai penggerak ekonomi. Dari kaum Fisiokrat Perancis, dengan paham *laissez faire* kemudian mempengaruhi Adam Smith, ahli filsafat ekonomi Skotlandia untuk membangun pemikiran-pemikiran yang logis dan didukung alasan-alasan yang empiris. Pikiran itu dimuat dalam bukunya yang sangat termasyhur: "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" (1776). Gagasan Smith yang sangat dipengaruhi oleh filsafat etis bertujuan untuk menciptakan *good community* atau lebih tepatnya seperti disebutkan dalam bukunya "*The Theory of Moral Sentiments*" (1759) untuk menjadikan "to make men better, not just better off".³

Namun pokok-pokok pikiran Smith yang menjadi dasar faham kapitalisme ini, dalam perkembangannya hanya diambil dari sisi kebebasan individualnya saja dengan meninggalkan kandungan etis tujuan terjadinya masyarakat yang baik. Padahal prinsip-prinsip etika dalam menjalankan mekanisme pasar tidak bisa dikesampingkan begitu saja hanya karena alasan ekonomi. Dengan demikian perkembangan kapitalisme menjadi berubah arah. Ilmu ekonomi yang merupakan terapan dari filsafat etik bergerak menjauh dari akarnya. Persaingan yang tercipta akhirnya diarahkan untuk maksud saling menghancurkan. Motivasi untuk menumpuk kekayaan yang berlebih-lebihan, sifat individualistis, dan persaingan yang tidak sehat akhirnya menggiring pada situasi ketamakan (*greed*). Akibatnya dengan kenyataan seperti ini *gap* ekonomi antara "kelas yang diuntungkan" dengan "kelas yang tak diuntungkan" menjadi lebar dan semakin lebar.

Dalam keadaan seperti itu peran yang diharapkan dari universitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan etika sosial masyarakat pun dikhawatirkan makin menyurut. Derek Bok⁴, pernah mengeluarkan keprihatinannya bahwa universitas tak lagi dapat berperan secara menyeluruh kepada kepentingan masyarakat tetapi lebih dipengaruhi oleh kekuatan uang yang datang dari pihak eksternal, yaitu dunia industri. Akibatnya, penelitian atau perkembangan-perkembangan teori ditentukan oleh ada atau tidaknya dana untuk kebutuhan tersebut. Bagi sektor industri, mereka akan membiayai kebutuhan-kebutuhan kampus selama itu terkait (*link and match*) dengan kepentingannya.

Karena itu, yang berkembang adalah fakultas yang diperlukan industri seperti bidang bisnis dan hukum, sedangkan studi-studi yang kurang diperlukan menjadi kurang berkembang dan bahkan tertinggal. Akhirnya universitas tidak lagi bisa berperan secara menyeluruh bagi kepentingan masyarakat.

Globalisasi, Neoliberalisme serta Implikasinya

Perkembangan industri dan keuangan yang pesat mendorong terjadinya globalisasi, karena kedua bidang itu mencari sumber daya secara efisien. Hambatan-hambatan buatan manusia diterobos dengan ganasnya, karena gagasan dasar globalisasi adalah "menyatukan dunia", tanpa tapal batas yang ekstrim antara satu negara dengan negara lainnya. Semua dapat bersentuhan secara langsung tanpa

³ Jerry Z. Muller, *The Mind and the Market*, Anchor Books, New York, 2002, hal.52.

⁴ Derek Bok adalah mantan Rektor Universitas Harvard yang melihat bahwa peran universitas di Amerika Serikat tidak bisa berfungsi maksimal sebagai lembaga ilmiah yang dapat memberikan sumbangannya kepada masyarakat secara keseluruhan.

batas budaya, ekonomi dan sosial. Seperti kata Alvin Toffler bahwa globalisasi akhirnya dapat menciptakan *collective consciuosness*, atau kata Kenji Ohmae bahwa globalisasi akan melahirkan *borderless world*. Dengan perkembangan pesat teknologi informasi, globalisasi dibidang ekonomi dan keuangan menciptakan *multi national companies (MNC)* dan *global companies*. Dampak negatifnyapun banyak, terutama dengan sistem keuangan dunia yang telah menyatu, gejolak keuangan satu negara bisa cepat menular ke negara lainnya seperti krisis moneter di Thailand 1997, yang dengan cepat merembet ke Asia kemudian melalui Rusia dan akhirnya ke Amerika Latin. Amerika Serikat akhirnya menjadi korban dari krisis negara-negara tersebut, karena investasi global terpengaruh keruntuhan ekonomi beberapa negara itu.

Disamping itu, perkembangan globalisasi membawa pesan neoliberalisme pula, salah satu bentuk kapitalisme yang menganggap bahwa hubungan manusia itu terjadi hanya karena faktor-kepentingan ekonomi semata. Fakta yang kita lihat sekarang membuktikan bahwa berkembangnya struktur sosial dan ekonomi bangsa-bangsa terjadi karena pertalian intensif atas kepentingan-kepentingan materi yang mengitarinya. Penyebaran faham ini telah mendatangkan manfaat besar pada tercapainya perdagangan bebas dan terselenggaranya demokrasi. Namun kebaikan-kebaikan serta manfaat yang dibawa oleh neoliberal juga membawa hasil ikutan yang tidak diinginkan (*unintended results*).

Kesenangan akan materi ini menyebabkan banyak terjadi tindakan-tindakan manipulatif besar yang dampaknya sangat luas, seperti terjadi di Barings Bank cabang Singapore dengan dealer Nick Leeson sebagai biang keladinya yang menjebak bank yang telah berusia 170 tahun bangkrut. Demikian juga dengan kejatuhan Enron yang membawa serta kantor akuntan Arthur Andersen, kejatuhan Worldcom dan perusahaan lain-lain yang cukup banyak jumlahnya. Prof. Sumantra Gosal almarhum dari London *School of Economics* berpendapat bahwa hal itu terjadi karena ilmu manajemen telah terlalu mengikuti ilmu ekonomi, dengan asyiknya memakai model-model agar dianggap "lebih ilmiah". Mereka juga terlalu terpaku mengikuti aliran monetaris Milton Friedman dari Universitas Chicago yang beranggapan bahwa "satu-satunya tujuan para manajer perusahaan hanyalah untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham"⁵

Karena itu, kita menjadi bisa memahami apa yang dirasakan oleh Bok bahwa kampus telah mengabaikan pendidikan moral yang seharusnya dikembangkannya. Pergeseran nilai-nilai moral telah terjadi. Kampus yang tadinya masih menjadi pusat untuk membangun solidaritas terutama bagi kelompok yang terisih akibat nilai-nilai baru yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan industri dan faham yang meletakkan sepenuhnya pada asas materi, tugas membangun solidaritas tersebut menjadi hilang. Disamping itu, persoalan etika akademik belakangan ini juga muncul dan menjadi sorotan karena mudahnya pemberian gelar-gelar akademik maupun kehormatan (*honoris causa*) yang telah "melecehkan" gelar-gelar akademik yang selama ini diberikan melalui proses-proses pengujian ilmiah dan memenuhi standar akademik.⁶ Uraian tentang etika ini juga dapat dibaca dalam artikel Sarlito Wirawan Sarwono, "Krisis Etika di Indonesia," (*Kompas*, 26/02/2005)

⁵ The Economist Igl.....

Peristiwa yang dipahami sebagai “gejala reduksi” dari makna kampus sebagai lembaga ilmiah yang melahirkan teori, konsep dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan masyarakat. Kampus akhirnya benar-benar diposisikan sebagai “korporasi”.

Menuju Pada Kesetaraan

Arus globalisasi tidak mungkin kita hambat. Interaksi ekonomi, politik, sosial dan budaya telah demikian menyatu. Suatu negara tidak dapat berbuat semaunya sendiri tanpa memperhitungkan apa yang sudah berlaku di negara-negara tetangganya atau negara partner perdagangan-internasionalnya. Seperti dikemukakan oleh Manmohan Singh Menteri Keuangan India pada 1998, suatu negara merasakan keuntungannya mempunyai akses ke pasar uang global, tetapi kemampuan pemerintah untuk berbuat dan mengontrol akan menjadi berkurang karena kebijakannya hanya merupakan bagian dari kebijakan global yang ditentukan oleh negara adikuasa.⁶ Kalau tidak ingin dipinggirkan, kita harus mengikuti *common practices* yang telah berlaku global, berupa melaksanakan standar dan prosedur yang telah baku agar tetap bersaing dalam *level playing field*.

Marzuki Usman semasa menjadi ketua ISEI sering melontarkan *warning* bila pendidikan kita tidak setara dengan negara tetangga, maka dikhawatirkan kita tidak dapat masuk kenegara tetangga, bahkan sebaliknya Indonesia akan dibanjiri para akuntan dari Srilangka, auditor dan perawat dari Filipina dan bankir dari Singapura. Ia juga mengusulkan agar dibentuk dana abadi di Universitas untuk mendukung *Chair Professor* yang akan membantu mendapatkan pengajar yang baik. Pada tahun 1998 juga pernah ada pertemuan antara ISEI dibawah pimpinan Marzuki Usman dan PII dibawah Aburizal Bakrie yang membicarakan agar sertifikasi para lulusan dilakukan untuk kesetaraan di regional maupun internasional. Namun upaya itu belum kelihatan hasilnya karena krisis 1997 telah mengalihkan perhatian semua orang.

Persiapan menuju kesetaraan bukan hanya tugas universitas saja, tetapi juga sebelum itu. Pendidikan primer, sekunder maupun tertier harus menciptakan suasana bagi terbentuknya “manusia seutuhnya” tersebut. Menurut hemat saya ada tiga hal penting yang harus dicamkan (*instill*) yaitu kemampuan penalaran (*reasoning*), kemampuan berkomunikasi dan dasar etis. Kemampuan pertama dapat dilakukan melalui pelajaran filsafat logika dan pembuktian matematika. Perlu dihilangkan kebiasaan menghafal (*roting, memorizing*) yang tidak membantu kemampuan analisa berdasarkan alur penalaran sebab-akibat. Kemampuan kedua berupa kemampuan berbahasa dengan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, baik dalam bahasa sendiri maupun bahasa kedua yang dipilih (biasanya bahasa Inggris). Kebiasaan mengarang dan membuat laporan dengan membuat *essay* sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan ini.

Kemampuan ketiga merupakan hal yang terpenting. Sekarang terjadi persepsi bahwa etika adalah lebih menjadi tanggung jawab keluarga, daripada sekolah. Padahal dalam suasana dimana lebih banyak *working parents* dan jam pelajaran yang lebih panjang, peran sekolah disini menjadi lebih penting. Dengan demikian,

⁶ Uraian tentang etika ini juga dapat dibaca dalam artikel Sarlito Wirawan Sarwono, “Krisis Etika di Indonesia,” (Kompas, 26/02/2005)

⁷ Dalam Friedman, Thomas L. “The Lexus and the Olive Tree” (2000) hal. 108.

lulusan sekolah sekunder sebetulnya sudah harus disiapkan menjadi tenaga "siap latih dan pakai". Universitas selanjutnya akan mudah menambah pengetahuan akademis dan praktis, sehingga lulusannya akan merupakan hasil yang akademis tetapi mudah beradaptasi pada masyarakat. Tinggal tugas perusahaan sebagai *end user* yang akan meneruskan pembelajaran mereka melalui pendidikan dan pelatihan untuk penyempurnaannya, termasuk mempertahankan *content* etika melalui prinsip *good corporate governance*. Bagi perusahaan maupun bagi asosiasi profesi yang memberikan sertifikasi, pendidikan merupakan suatu keharusan dan bukanlah merupakan hal yang pelik karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Tetapi bagaimana dengan universitas? Hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena berbagai kesulitan terutama keterbatasan biaya disamping makin banyaknya persaingan bukan hanya lokal saja, tetapi juga global. Hanya kampus yang mampu menawarkan *output* nyata yang memiliki *link and match* dengan dunia industri yang akan diserbu oleh calon-calon mahasiswa. Padahal universitas yang demikian hanya akan menciptakan manusia yang individualistis dan tidak peka terhadap realitas sosialnya. Universitas sendiri sebenarnya mempunyai pengertian *universum* seperti dikatakan oleh seorang pakar: "..... universitas merupakan pendidikan umum yang menghasilkan manusia cendekiawan yang bukan saja merupakan seorang ahli, tapi juga seorang pemikir umum yang mempunyai kepedulian bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan."⁸ Memenuhi definisi itu, ia berpendapat bahwa universitas harus dapat menciptakan manusia ideal yaitu manusia yang kreatif, yang berpikir alamiah; dan bersikap etis. Menurutnya, ketiganya harus dibangun secara seimbang, tidak bisa menafikan satu dengan yang lainnya agar berguna, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat..

Maksud ideal tadi patut dipertemukan dengan pertanyaan praktis: mampukah perguruan tinggi di Indonesia menciptakan sosok manusia seperti itu sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi ini? Suatu hal yang tidak mudah karena universitas harus mempunyai "kemampuan akrobatik" untuk mencapai tujuan ideal dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Pemerintah memang juga harus ikut serta menciptakan manusia-manusia yang serba tahu dan sadar akan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga perusahaan-perusahaan yang sekarang dituntut untuk lebih *concern* kepada lingkungan perlu dimintai bantuan. Tidak hanya kepada bidang yang mereka perlukan saja, tetapi juga kepada bagian yang "kering" yang hasilnya tidak bisa dimanfaatkan segera, tetapi lebih ke manfaat jangka panjang dan untuk mencegah terjadinya *brain drain*. Karena itu riset-riset di dunia perguruan tinggi harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan perusahaan.

Gagasan membangun universitas yang bercorak korporasi diharapkan dapat mempertemukan semua kepentingan yang diharapkan tadi. Konsep mengubah universitas negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dimaksudkan untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru tanpa harus meninggalkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus diharapkan dapat menjual hasil-hasil risetnya kepada pemerintah maupun perusahaan sehingga dapat membiayai pengelolaannya secara otonom.⁹ Karena idealnya, perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah tidak boleh terlalu menggantungkan dirinya dengan kekuatan eksternal (dunia industri), mereka

⁸ Anif Budiman dalam buku Derek Bok, *Universitas dan Masa Depan Amerika Serikat* (op.cit)

secara independen harus memiliki unit-unit riset yang dimaksudkan untuk bisa memperoleh sumber-sumber pendanaan yang bersifat tidak mengikat, dan dapat menyumbangkan hasil-hasil riset untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Memang gagasan-gagasan untuk perbaikan universitas itu umumnya masih bersifat *vicious cycle*, dengan variabel-variabel solusi yang masih saling mereduksi. Seperti misalnya, agar kualitas pengajaran baik, biaya pendidikan harus dinaikkan. Pilihannya adalah atas siapa, mahasiswa atau subsidi pemerintah yang diperoleh dari pajak. Atau dengan minta agar swasta (industri) masuk yang dapat mengurangi independensi lembaga perguruan tinggi.

Karena pemerintah tetap harus memiliki peran penting untuk menyelamatkan dunia pendidikan karena sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah harus menambah anggaran pendidikan diantaranya dengan menaikkan pajak. Pendekatan pajak ini menurut beberapa pengamat memenuhi aspek keadilan, yaitu masyarakat mampu turut serta membayar pajak dengan jumlah yang proposional.

Akan tetapi seperti yang saya amati, pemahaman otonomi selama ini lebih diartikan secara sempit yaitu masalah pendanaan. Padahal, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana memahami otonomi itu secara lebih luas. Karena itu, kita bisa merujuk kembali pendapat seorang rektor ke deklarasi Lima tentang "*Academic Freedom and Autonomy of Higher Education*."¹⁰ Penekanan deklarasi tersebut adalah pada aspek-aspek adanya kebebasan dalam pengelolaan dunia akademik, kebebasan masyarakat akademik untuk melaksanakan tugas-tugas akademiknya; kebebasan untuk melakukan penelitian tanpa pengekangan dari pihak-pihak lainnya; adanya kepemilikan hak-hak ekonomi, sosial, kultural, dan politik dari masyarakat serta mencegah penyalahgunaan ilmu dan teknologi yang menyalahi hak-hak tersebut.

Selanjutnya peranan universitas dalam masyarakat harus aktif dan berkelanjutan; membangun komunikasi dan hubungan dengan pihak-pihak lainnya yang serupa; lembaga akademis harus mencegah ketergantungan dengan ilmu dan teknologi dan mengupayakan kemitraan dengan yang setara dengan komunitas akademik di dunia; lembaga pendidikan harus menjamin dinamika pihak-pihak civitas akademika; dan otonomi perguruan tinggi harus diselenggarakan secara demokratis.

⁹ Kompas (05/03.2005)

¹⁰ Prof. Eko Budihardjo (Rektor Universitas Diponegoro) sangat detail menjelaskan tentang otonomi Pendidikan Tinggi ini dalam artikelnya "Menyongsong Undang-Undang BHP," (Kompas, 07/03/2005)

Penutup

Masalah pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai kesulitan, ditambah lagi dengan timbulnya paradigma baru sehubungan dengan terjadinya globalisasi. Penyiapan tenaga kerja untuk memenuhi pasar tenaga kerja yang telah berubah memerlukan pemikiran yang lebih inovatif. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah mengalami banyak perubahan praktis karena faktor politis, dasarnya harus diubah menjadi lebih berdasarkan faktor ekonomis tanpa meninggalkan unsur etika moral. Suatu kerja besar dan tidak mudah, tetapi harus dilakukan kalau kita tidak ingin tersisih dari percaturan global. *Lifetime learning* harus digalakkan dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang ada tanpa terpaku pada kesulitan-kesulitan saja. Dan yang dasar terpenting adalah bahwa dunia pendidikan harus dikembalikan otoritasnya sebagai lembaga yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan (*universum*).

Referensi

- Budihardjo, Eko. "Menyongsong Undang-Undang BHP". *Kompas*, 7 Maret 2005.
- Derek Bok. *Universitas dan Masa Depan Amerika*. Jakarta: Yayasan Sunter Agung, 1997.
- Friedman, Thomas L. *The Lexus and the Olive Tree*. [...] : [...], 2000.
- Muller, Jerry Z. *The Mind and the Market*. New York: Anchor Books, 2002.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. "Krisis Etika di Indonesia". *Kompas*, 26 Februari 2005.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984.